

Judul : DPR beri dukungan, perampingan bikin BUMN makin efisien
Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Beri Dukungan

Perampingan Bikin BUMN Makin Efisien

SENAYAN mendukung langkah perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dicanangkan Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR Firmando Ganinduto mengatakan, kebijakan perampingan BUMN merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara Indonesia kepada seluruh perusahaan pelat merah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pemborosan anak dan cucu perusahaan yang sudah tidak memiliki fungsi yang jelas.

"Jadi ini saatnya kita merampingkan dan efisiensi BUMN serta memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak lagi membuang uang rakyat yang akhirnya tidak ada gunanya," tegas Firmando di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anak dan cucu perusahaan di lingkungan BUMN, terutama Pertamina dan PT PLN.

Perampingan struktur tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga efisiensi perusahaan negara. Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hamalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) malam.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Firmando mendorong agar proses perampingan dapat diakselerasi secara presisi, cepat dan efektif. Tujuannya agar struktur BUMN menjadi lebih ramping tanpa mengurangi fungsi utamanya.

Khusus PT Pertamina, Firmando menilai, perampingan tidak ditujukan untuk memperkecil atau mengganggu bisnis inti perusahaan di sektor energi tersebut. Sebaliknya, pemisahan

unit usaha non-inti justru akan membuat kinerja BUMN energi itu semakin terfokus dalam memperkuat ketahanan energi nasional. "Pertamina itu perusahaan energi sumber daya mineral, jadi rumah sakit, pesawat atau bisnis lain di luar dari energi sumber daya mineral itu perlu dipisahkan," kata politisi Golkar ini.

Senada, anggota Komisi VI DPR Ida Nurlaela Wiradinata mendukung upaya Pemerintah menyelamatkan BUMN. Namun, penyesuaian yang dilakukan tidak sekadar melalui pengurangan jumlah perusahaan. Karena itu, Danantara Indonesia selaku induk perusahaan negara perlu cepat menyelesaikan evaluasinya dan menyampaikannya secara terbuka terkait kinerja, aset, utang, dan kontribusi masing-masing BUMN. "Harapannya agar tidak ada perusahaan negara yang jadi beban," ujar Ida di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Selain itu, Ida menyoroti kondisi BUMN Karya yang memerlukan langkah restrukturisasi dan konsolidasi yang lebih serius. Perusa-

haan tersebut perlu diarahkan pada proyek yang produktif dan memiliki kepastian pembiayaan, memperkuat tata kelola, mengendalikan utang, serta menghindari praktik mengambil proyek tanpa perhitungan kemampuan keuangan.

"Transparansi dalam proses pembenahan BUMN sangat penting. Jangan sampai restrukturisasi hanya menyelesaikan persoalan di atas kertas, tetapi tidak menyentuh akar masalahnya," jelas politisi PDIP ini.

Sedangkan, anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menyambut baik rencana Danantara Indonesia yang membangun sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMN yang terintegrasi dan menargetkan posisi direksi hingga Chief Executive Officer (CEO) BUMN diisi oleh talenta internal mulai 2028. Arah kebijakan tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme BUMN sekaligus mengakhiri praktik penempatan figur yang tidak memiliki kompetensi dan rekam jejak relevan

hanya karena kedekatan politik.

"Jika target 2028 dijalankan konsisten, berbasis rekam jejak, kompetensi, integritas, dan kebutuhan bisnis, kita memiliki peluang besar untuk memutus mata rantai balas jasa politik dalam pengelolaan BUMN," tegas Ateng di Jakarta, Rabu (12/08/2026).

Ateng menilai, rencana transformasi SDM yang tengah disiapkan, termasuk penerapan *single grading system* atau sistem pemerincian tingkat kelas jabatan, hingga pengembangan kepemimpinan melalui Danantara Corporate University, merupakan langkah tepat. Sistem tersebut dapat membentuk *talent pool* atau kandidat potensial lintas BUMN, serta membuka mobilitas karier berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Kaderisasi internal, kata dia, juga memiliki sejumlah keunggulan. Seperti memiliki pemahaman lebih baik terhadap karakter bisnis, budaya organisasi, serta risiko. Namun, istilah "talenta internal" tidak secara otomatis dianggap sebagai jaminan meritokrasi. ■ TIF